

**Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan
Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Dagang Dimas Swalayan Tahun 2018**

SKRIPSI

Oleh:

SITI ADY AFNI SAFITRI

NIM : 52153060

Program Studi

Akuntansi Syariah



FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATRA UTARA

MEDAN 2019

**Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan
Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Dagang Dimas Swalayan Tahun 2018**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)**

Oleh:

SITI ADY AFNI SAFITRI

NIM : 52153060

Program Studi
Akuntansi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUMATRA UTARA
MEDAN
1434 H / 2019 M**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Siti Ady Afni Safitri**

Nim : 52153060

Tempat/tgl. Lahir : Jakarta, 02 Desember 1995

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jl. Meranti, no. 17 Percut Sei Tuan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) (STUDI KASUS USAHA DAGANG DIMAS SWALAYAN T.A 2017-2018)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 17 Februari 2021
Yang membuat pernyataan

Siti Ady Afni Safitri

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**“PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA USAHA DAGANG
DIMAS SWALAYAN T.A 2017-2018”**

Oleh:

Siti Ady Afni Safirti

Nim. 52153060

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)

Pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah

Medan, 12 Oktober 2019

Pembimbing I



Zuhri M Nawawi, MA

Pembimbing II

Nur Fadhilah Ahmad Hsb, M.AK

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

Hendra Harmain

Skripsi berjudul **“PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) (STUDI KASUS USAHA DAGANG DIMAS SWALAYAN TA 2017-2018)”** an Siti Adyafni Safitri, NIM 52153060 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tanggal 19 Desember 2019 skripsi ini telah diterima dan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.AKUN) pada prodi Akuntansi Syariah.

Medan, 17 Februari 2021

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UINSU

Ketua

Dr. Sugianto, MA

Nip. 196706072000031003

NIDN. 2007066701



1. Zuhrinal M. Nawawi, MA

Nip. 1976081820071011001

NIDN. 2018087601

3. Dr. Sugianto, MA

Nip. 196706072000031003

NIDN. 2007066701

Sekretaris



Rahmi Syahriza, S.Th.I, MA

Nip. 198501032011012011

NIDN. 2003018501

Anggota

2. Nur Fadhilah Ahmad Hsb, M.AK

Nip. 1100000036

4. Aqwa Naser Daulay, M.Si

Nip. 1100000091

NIDN. 202418801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Andri soemitra, M.A

Nip. 197605072006041002

NIDN. 20070576

ABSTRAK

Siti Ady Afni Safitri (2019) NIM: 52153060 Skripsi berjudul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Usaha Dagang Dimas Swalayan T.A 2018”. Dibawah Bimbingan Pembimbing I Bapak Zuhri M Nawawi, MA dan Pembimbing II Ibu Nur Fadhilah Ahmad Hsb, M.Ak. Skripsi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah banyak dipilih oleh sebagian masyarakat untuk keluar dari masalah sosial yang ada. UMKM seharusnya memiliki pencatatan laporan keuangan dimana laporan keuangan tersebut haruslah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Namun masih banyak UMKM yang tidak memiliki pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standar seperti UMKM yang ada di Desa Marjanji. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pada Usaha Dagang Dimas Swalayan dan bagaimana penerapan yang dilakukan Usaha Dagang Dimas Swalayan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di Usaha Dagang Dimas Swalayan yang terletak di Dusun IV, Desa Marjanji, Kecamatan Sipis-pis, Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kondisi pencatatan laporan keuangan Usaha Dagang Dimas Swalayan masih sangat sederhana dan belum diterapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Catatan Atas Laporan Keuangan, dan tidak mencatat Laporan Posisi Keuangan melainkan hanya catatan atas keluar masuknya kas saja.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya sert apetunjuk kepada penulis, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Usaha Dagang Dimas Swalyan T.A 2017-2018” Shalawat dan salam penulis hanturkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat islam.

Skripsi ini berjudul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Usaha Dagang Dimas Swalyan T.A 2017-2018” disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada program studi S1 Akuntansi Syariah Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Pada awalnya penulis mengalami berbagai kesulitan, namun berkat doa, usaha yang maksimal dari penulis, doa dan dukungan dari keluarga serta berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan penulis. Oleh karna itu, Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta dan terhebat serta teristimewa dalam hidup penulis yakni Ayah dan Ummi tercinta dan dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih banyak yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT, yang telah meridhoi dan memberikan kemudahan setiapkesulitan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan telah memberikannikmat tiada terkira kepada penulis.
2. Baginda Rasulullah SAW, yang telah menghantarkan umatnya kepada jalanyang terang benderang.
3. Bapak Prof.Dr.Saidurrahman,M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Dr. Andri Soemitra,M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

5. Bapak Zuhri M Nawawi, MA selaku Pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan sekaligus selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Ibu Nur Fadhilah Ahmad Hsb, M.Ak selaku Pembimbing II yang telah bersedia memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayahanda tercinta Ahmadi dan Ummiku tersayang Zahra Wati Purba yang selama ini selalu memberikan dukungan, do'a dan semangat kepada peneliti untuk terus berusaha dan terus menjadi pribadi yang lebih baik.
8. Keluarga yang senantiasa saling mendoakan dan mensupport peneliti untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan segera menyelesaikan skripsi.
9. Bapak Dimas selaku pemilik Usaha Dagang Dimas Swalayan di mana saya diberi izin untuk melakukan tempat riset di tempat usaha beliau.
10. Bang Fajar, Mbak Susan dan Mbak Lia karyawan Dimas Swalyan yang membantu saya menyelesaikan skripsi saya.
11. Sahabat sahabat tercinta Windy Pratiwi, Ana Marianta, CharaniAsmi, Indah Permata Sari, yang selalu mensupport penulis, selalumemberi arahan dan masukan yang lebih baik, dan untuk segeramenyelesaikan skripsi.
12. Andri Pratama Lubis teman yang membantu saya dan menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi saya.
13. Teman teman satu pondokan dulu di pesantren Musthafawiyah tercinta saidah, kak ipeh, dhani, nisa, fitri yang memberikan saya nasehat nasehat dan doa terbaiknya.
14. Sahabat sahabat seperjuangan seluruh teman-teman akuntansi Syariah stambuk 2015 yang sama sama saling mensupport menyelesaikan skripsi.
15. Teman-Teman di Kost Caem Rani, Ayu, Ulfah, Aini, Rita selalu memberi arahan dan masukan yang lebih baik, dan untuk segera menyelesaikan skripsi.

16. Seuruh pihak yang ikut serta membantu penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan maupun penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karna itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun para pembaca, sehingga skripsi ini menjadi referensi pada masa yang akan datang untuk mengarah kepada perbaikan agar dapat mencapai hasil yang maksimal bagi penulisan skripsi-skripsi selanjutnya. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi khalayak umum. Aamiiin

Medan, 12 Oktober 2019

Siti Ady Afni Safitri

Nim: 52153060

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISIv

DAFTAR TABEL.vi

DAFTAR GAMBARvii

BAB I PENDAHULUAN12

A. Latar Belakang Masalah 12

B. Perumusan Masalah 17

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 17

BAB II LANDASAN TEORI.....19

A. KAJIAN TEORIS..... 19

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 19

2. Pengertian Akuntansi 27

C. Kerangka Pemikiran 52

BAB III METODE PENELITIAN.....53

A. Pendekatan Penelitian..... 53

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 54

C. Subjek Penelitian 54

D. Sumber Data 55

E. Teknis dan Instrumen Pengumpulan Data	55
F. Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV TEMUAN PENELITIAN	59
A. Gambaran Umum Perusahaan	59
1.Latar Belakang Perusahaan	59
2. Visi dan Misi Perusahaan.....	60
3. Struktur Organisasi Perusahaan	61
4. Maksud dan Tujuan Perusahaan	62
B. Temuan Penelitian	63
1. Deskripsi Laporan Keuangan Dimas Swalayan.....	65
C. Pembahasan	70
BAB V PENUTUP	71
A. KESIMPULAN	71
B.SARAN-SARAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil Menengah yang sering juga disebut UMKM adalah bentuk usaha yang dikelola oleh orang atau sekelompok orang dengan sejumlah modal tertentu dan mendirikan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba dengan kemampuan mengembangkan proses bisnis yang fleksibel. Pada umumnya, UMKM bersifat usaha keluarga. Dalam artian usaha ini dijalankan dan dikembangkan sendiri oleh pemilik usaha bersama keluarganya. Setelah berkembang cukup besar, pemilik UMKM akan memperkerjakan penduduk disekitarnya.¹

Di Indonesia ternyata Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) telah banyak dipilih oleh sebagian masyarakat untuk keluar dari masalah sosial yang ada. Secara sederhana UMKM adalah usaha produktif milik perorangan dengan teknologi dan pengelolaan yang masih sangat sederhana.² Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang penting didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peranan UMKM selain berperan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, UMKM juga mempunyai peranan yang penting dalam mengatasi masalah pengangguran.

Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi pengangguran. Dalam 5 tahun terakhir kontribusi sektor usaha mikro, kecil dan menengah terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84% menjadi

¹Akifa P. Nayla, *komplet akuntansi untuk UKM dan waralaba* (Yogyakarta: Laksana, 2004) h.19.

²Alfa Hartoko, *40 Tool Dahsyat untuk Mengelola Bisnis UMKM* (Jakarta: PT. Elex Media Kompatindo, 2010) h. 03.

60,34%. Begitu juga dengan serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama.³ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan.

Kontribusi besar UMKM meliputi penyerapan tenaga kerja, penciptaan tenaga kerja, dan terutama menjadi penahan saat terjadinya krisis ekonomi. Melihat peran penting tersebut, dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak untuk mengembangkan dan mewujudkan UMKM yang maju, mandiri, dan modren, termasuk memiliki akses pendanaan yang lebih luas ke sektor perbankan.

Salah satu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Marjanji yang cukup besar adalah Dimas Swalayaan. Dimana entitas ini adalah usaha dagang yang menjual berbagai macam perlengkapan atau kebutuhan rumah tangga masyarakat lokal. Usaha ini telah dikembangkan dalam waktu yang cukup lama dan berkembang karena banyak diminati oleh konsumen.

Alasan peneliti memilih Dimas Swalayan sebagai lokasi untuk melakukan riset atau menjadi objek penelitian karena Dimas Swalayan merupakan Usaha Dagang yang cukup maju dan sukses di wilayah Desa Marjanji yang berdiri sejak tahun 2012, usaha ini bergerak dibidang penjualan barang-barang dagang berupa pakaian untuk ukuran dewasa dan anak-anak, laki-laki dan perempuan kemudian menjual berbagai macam kebutuhan pokok, serta alat-alat tulis dan berbagai macam perlengkapan dan kebutuhan lainnya.

Alasan lain adalah karena Usaha Dagang Dimas Swalayan ini sudah melakukan pencatatan atas pengeluaran dan pemasukan, beban gaji, beban listrik, beserta utang, namun tidak dilakukan pemisahan antara asset lancar dan tidak lancar, utang jangka pendek dan utang jangka panjang, padahal penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dapat membantu entitas dalam melakukan transisi dari pelaporan keuangan

³Rio Brian, "Forum Bisnis Indonesia- Pengusaha.co, <https://forum.maxmanroe.com/melihat-perkembangan-umkm-di-indonesia> diunduh tanggal 18 Maret 2019

berdasarkan kas ke pelaporan keuangan yang berdasarkan akrual. Dan juga dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi Usaha Dagang Dimas Swalayan sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri perbankan.

Hal ini juga disampaikan oleh Pak Dimas selaku pemilik tanggal 15 Agustus 2019 pada pukul 11.00 WIB:

"iya nak, bapak melakukan pencatatan agar bapak tau berapa keuntungan atau kerugian yang bapak terima setiap bulannya, bapak melakukan pencatatan biaya pengeluaran dan pemasukan, beban gaji, beban listrik".

Mendirikan sebuah usaha, tentunya harus mempunyai catatan administrasi. Catatan administrasi dapat berupa Laporan Keuangan. Masih banyak UMKM yang belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Rata-rata laporan keuangan yang disusun masih sangat sederhana. Laporan keuangan tidak hanya berguna untuk memberikan informasi terkait dengan pemasukan dan pengeluaran saja tetapi juga untuk mengetahui kinerja perusahaan selama periode berjalan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) sebagai penyusun standar akuntansi keuangan yang diakui di Indonesia, menyadari pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam memajukan perekonomian bangsa. Oleh karena itu, pada tahun 2009 DSAK IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai bentuk dukungan untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan UMKM.⁴

Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang

⁴Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah* (Jakarta: Grha Akuntan, 2018), h. ix.

memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut. SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dari SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis.

Seiring perkembangannya, terdapat kebutuhan mengenai ketersediaan standar akuntansi yang lebih sederhana dari SAK umum berbasis IFRS dan SAK ETAP dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan menggunakan kedua pilar SAK tersebut.

Karena itu DSAK IAI melakukan pengembangan standar akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM dengan berbentuk kelompok kerja yang melibatkan asosiasi industri, regulator, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menghadirkan SAK yang dapat mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. Hingga akhirnya pada tahun 2016, DSAK IAI mengesahkan SAK Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) sebagai upaya mendukung kemajuan perekonomian di Indonesia.

Alasan lain pergantian SAK ETAP menjadi SAK EMKM adalah mayoritas entitas mikro, kecil, dan menengah di Indonesia sulit mendapatkan akses untuk ke perbankan dan sumber pendanaan lainnya. Kondisi ini terjadi karena EMKM tidak memiliki laporan keuangan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. Sehingga untuk menambah pendanaan EMKM sangat kesulitan dan akhirnya tidak dapat melanjutkan usahanya.⁵

Jadi, melakukan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku tidak hanya dapat diterapkan pada perusahaan besar dengan sumber yang berlimpah, namun juga dapat diterapkan pada UMKM yang pada umumnya memiliki keterbatasan sumber daya. Sistem informasi akuntansi pada dasarnya dapat disusun secara sederhana sesuai dengan kebutuhan dan

⁵*Ibid.*, ix.

kemampuan dari perusahaan, namun tidak mengurangi esensi serta manfaat dari penerapan sistem tersebut.

Dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar terlebih dahulu harus ada pembenahan sistem dari dalam perusahaan itu sendiri, karena sistem yang bagus akan memudahkan dalam penerapan dan kenyataan. Dalam hasil survey yang telah dilakukan sebagai upaya pengumpulan data dengan melakukan pra riset bahwa usaha keluarga Dimas Swalayan yang merupakan usaha kecil yang telah berdiri dan berkembang dari tahun 2012 yang menjual berbagai macam kebutuhan keluarga, baik kebutuhan pangan, alat tulis, pakaian dan banyak kebutuhan. Usaha Dimas Swalayan melakukan pencatatan akuntansi tapi belum melakukannya secara lengkap dan benar.

Beberapa alasan yang dikemukakan pemilik UMKM adalah karena kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam menyusun laporan keuangan sehingga perusahaan belum mengelola pencatatan laporan keuangan perusahaannya secara benar dan sesuai standar. Padahal banyak manfaat yang diperoleh jika menerapkan pencatatan akuntansi secara lengkap, seperti dapat memperluas pendanaan atau mengakses dana ke sektor perbankan.

Hasil penelitian Abdul Muchid (2015), Edi Susanto (2011), Nurlailan (2018), Sondakh dan Lintjen Kalangi (2014), Dewi Ratna Lubis (2016) menunjukkan bahwa banyak UKM belum menerapkan dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku secara umum. Alasan UKM belum menerapkan SAK ETAP, karena keterbatasan waktu, kurangnya pemahaman tentang akuntansi, dan kurangnya sumber daya manusia. Sehingga laporan keuangan yang diterapkan oleh UKM masih sangat sederhana. Dan masih belum banyak yang meneliti tentang SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah lebih mudah dibandingkan dengan SAK ETAP. Karena, terdiri dari tiga komponen yaitu, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Berbeda dengan SAK ETAP yang terdiri dari lima komponen yaitu, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan

modal, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan lima komponen yang bagi mereka mungkin terlalu sulit. Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan maka peneliti tertarik untuk membahasnya lebih lanjut mengenai **Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah pada Usaha Dagang Dimas Swalayan.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Usaha Dagang Dimas Swalayan ?
2. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi keuangan pada Usaha Dagang Dimas Swalayan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kondisi laporan keuangan Dimas Swalayan sebelum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)
- b. Untuk mengetahui apakah Usaha Dagang Dimas Swalayan telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah. Maka yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai penerapan SAK EMKM pada Usaha Dagang Dimas Swalayan.

- b. Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hal ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran atau hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk lebih mengetahui Penerapan SAK EMKM.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan untuk menindak lanjuti penelitian yang serupa serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya di masa yang mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KAJIAN TEORIS

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Dewasa ini kita sering mendengar singkatan UMKM. Yang artinya usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.⁶ Pengertian tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak selalu sama, tentang konsep yang digunakan negara tersebut. Mengenai pengertian atau definisi usaha kecil ternyata sangat bervariasi, disatu negara berlainan dengan negara lainnya.

Dalam definisi tersebut mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokkan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam gugusan/kelompok perusahaan tersebut (*range of the member of employeess*).⁷ Setiap negara memiliki definisi UMKM yang berbeda, sebagai contoh, di *Australia*, sebuah usaha dikategorikan sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah jika memiliki tenaga kerja masing-masing sebanyak 6 sampai dengan 20 orang.

Sedangkan di *Amerika*, UMKM adalah entitas bisnis yang memiliki tenaga kerja kurang dari 500 orang. Di *Jepang*, UMKM adalah entitas bisnis yang nilai investasinya kurang dari 300 juta, sedangkan di *Malaysia* batasan nilai investasi untuk UMKM adalah kurang dari sampai dengan RM 2,5 juta. Dari segi nilai aset, *philippines* dan *Singapore* memberikan batasan bagi UMKM masing-masing sebesar sampai dengan P 60 juta dan SGD 15 juta, *China* memiliki sistem

⁶Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: ALFABETA, cv 2017), h. 37.

⁷Tiktik Sartika Partomo dan Abd Rachman Seojoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, (Bojongkerta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 13-14.

klasifikasi yang lebih kompleks.⁸ Sebagaimana diketahui, definisi Usaha Mikro (UM), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) berbeda-beda di dalam beberapa peraturan sebelum berlakunya UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang disahkan oleh DPR-RI.

Definisi dan peraturan tentang UMKM yang relevan dengan ketiga jenis usaha tersebut didasarkan kepada 4 (empat) buah produk hukum lama yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Instruksi presiden No. 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah, Peraturan Bank Indonesia No.7/39/2005 tentang pemberian Bantuan Tekhnis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.C.7 tentang pedoman penawaran umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil. Namun, sehubungan dengan telah disahkannya UU UMKM baru tersebut, maka definisi UMKM yang terdapat didalam peraturan-peraturan sebelumnya mengalami penyesuaian.

Menurut Undang-Undang nomer. 20 tahun 2008 pasal 1 disebutkan bahwa:⁹

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

⁸Karya Bersama Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya dan Forum Derah UMKM Jawa Timur, *kewirausahaan UMKM pemikiran dan pengalaman*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 7-8.

⁹Undang-Undang Nomer. 20 Tahun 2008 Pasal 1

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha ya yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat peran dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Kondisi umum UMKM di Indonesia dapat digambarkan dari populasi tahun 2007 terdapat 49, 8 juta unit usaha yaitu sama dengan 96,9% jumlah unit usaha di Indonesia. Sedangkan penyerapan tenaga kerja = 88,7 juta yaitu sama dengan 96, 9% dari seluruh tenaga kerja.

Salah satu pilar utama dari ekonomi nasional, UMKM harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tersebut, yang di wujudkan melalui pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan adalah upaya yang di lakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergi dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Kontribusi UMKM amat jelas dalam perekonomian di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang jumlahnya dominan tersebut mampu menyediakan 99,04% lapangan kerja. Demikian halnya dengan sumbangan terhadap Produk Domestic Bruto (PDB) Non Migas, cukup meyakinkan yaitu sebesar 63,11%. UMKM juga memberikan kontribusi pada ekspor non migas sebesar 14,20%. Hal ini berarti pada sektor-sektor dimana terbuka bagi

masyarakat luas UMKM mempunyai sumbangan nyata. Sehingga kemampuan untuk melahirkan percepatan pemulihan ekonomi akan ikut ditentukan oleh kemampuan menggerakkan UMKM.¹⁰ UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan digali kembali potensi-potensi yang ada untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat.¹¹

Maka dengan demikian tentunya keberadaan UMKM dapat meningkatkan perubahan struktur ekonomi di daerahnya. Eksistensi UMKM dapat menyokong perekonomian Indonesia tidak dapat diragukan lagi. Hal ini telah terbukti pada tahun 1998 hingga tahun 2005, usaha kecil menengah mampu bertahan dan menjadi roda penggerak utama perekonomian di Indonesia selama terjadinya krisis.¹²

b. Pengertian Entitas

Entitas adalah setiap individu dan/atau organisasi yang berbadan hukum. Berdasarkan konsep ekonomi pengertian entitas adalah setiap unit ekonomi yang menjalankan atau kegiatan finansial untuk kepentingan diri sendiri. Berdasarkan konsep akuntansi pengertian entitas adalah suatu unit usaha atau kesatuan akuntansi, dengan aktifitas atau kegiatan ekonomi dari unit tersebut sebagai fokusnya.

Suatu kesatuan akuntansi bisa berupa suatu kegiatan atau fungsi saja, seperti misalnya: fungsi pengelasan dari suatu perusahaan karoseri, atau fungsi pengkreditan pada sebuah bank. Sebaliknya suatu kesatuan akuntansi atau entitas bisa meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan raksasa, seperti umumnya perusahaan multinasional.

¹⁰Rini Rahmawati dkk, *pengantar bisnis*, (Medan: Madenatera Quallfiedpublisher, 2018), h. 48.

¹¹Feni Dewi Anggraeni dkk, *pengembangan usaha Mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui fasilitas pihak eksternal dan potensi internal*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, h. 1286-1295.

¹²Sri Adiningsih, *satu decade pasca-krisis Indonesia: Badai Pasti Berlalu?* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 120.

Konsep entitas merupakan konsep yang penting dalam penyelenggaraan akuntansi, konsep ini menyatakan bahwa antara kesatuan usaha yang satu dengan kesatuan usaha yang lain atau dengan pemiliknya harus terdapat garis pemisah yang tegas, hal ini berarti kejadian keuangan yang menyangkut suatu kesatuan usaha lain atau dengan pemiliknya, dan sebaliknya.

pentingnya konsep entitas ini adalah konsep entitas menentukan bidang kepentingan dan dengan demikian mempersempit objek, kegiatan dan sifatnya yang dapat dipilih untuk dimasukkan kedalam laporan keuangan, lebih lanjut sifat entitas ini juga mempersempit pilihan apa yang dimasukkan dalam laporan keuangan dan membantu dalam menentukan bagaimana cara terbaik menyajikan informasi mengenai kesatuan. Jadi aspek relevan dapat diungkapkan dan aspek tidak relevan yang mengaburkan informasi dasar ditiadakan.

Dari penjelasan di atas konsep entitas sebenarnya sangat luas, konsep ini sebenarnya harus dipahami oleh semua pihak yang berkaitan dengan penyaluran kredit program tersebut, baik oleh penerima kredit maupun penyalur kredit, dari laporan yang dibuat oleh penerima kredit kepada penyalur kredit maka semestinya pemakai informasi dapat mengetahui apakah informasi yang diterima memiliki kelemahan-kelemahan sehingga bersikap hati-hati dalam menggunakannya maupun dalam mengambil keputusan.

Konsep entitas merupakan konsep yang sangat ideal untuk aktivitas koperasi dan lembaga keuangan mikro, ketika koperasi dan lembaga keuangan mikro mendapatkan kredit program dari pemerintah dan menyalurkannya kembali kepada anggota-anggotanya pencatatan jumlah nasabah yang meminjam kembali dana tersebut harus dilakukan terpisah dengan pinjaman dari sumber dana yang lain. Hal ini maksudkan agar terlihat seberapa jauh minat anggota terhadap dana dari kredit program pemerintah dan monitoring terhadap nasabah tersebut juga menjadi lebih mudah.

c. Kriteria UMKM

Dalam UU UMKM yang baru, yang dimaksud dengan “usaha mikro” adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Usaha produktif milik orang lain perorangan dan/atau badan usaha perorangan;
- 2) Memiliki kekayaan bersih sebanyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangun tempat usaha.
- 3) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya yang dimaksud dengan “Usaha Kecil” menurut UU UMKM adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
- 2) Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
- 3) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan yang dimaksud dengan “Usaha Menengah” dalam UU UMKM terbaru adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

¹³Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Ibid*

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

- 2) Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
- 3) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

d. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM

Menurut Undang-Undang nomer. 20 tahun 2008 pasal 4 disebutkan bahwa prinsip pemberdayaan UMKM sebagai berikut:¹⁶

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

e. Kekuatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- 1) Kebebasan Bertindak

perubahan merupakan ciri khas dunia usaha ini. Selalu ada produk-produk baru, mesin-mesin, yang lebih modren, teknologi baru. Pemilik perusahaan kecil dan menengah berada dalam suatu kedudukan untuk dapat bertindak dengan cepat

¹⁶Undang-Undang nomor. 20 tahun 2008 pasal 4.4

guna memenuhi tuntutan yang selalu berubah-ubah. Ini sangat penting untuk memenuhi tuntutan pasar yang relatif kecil. Perusahaan kecil dan menengah dapat memenuhi pesanan dengan tenggang waktu yang sangat pendek.

2) Penyesuaian dengan Kebutuhan Setempat

Pada umumnya pemilik perusahaan kecil dan menengah adalah penduduk yang berdiam lama dalam masyarakat yang mereka layani. Karena itu mereka berada dalam posisi yang baik untuk menilai kebutuhan-kebutuhan setempat, wirausaha lokal mempunyai hubungan yang erat dengan para pelanggan dan karyawan dan dapat melayani kebutuhan dan keinginan wilayah setempat.¹⁷

f. Kelemahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

1) Tidak atau Jarang Mempunyai Perencanaan Tertulis

Ketidakadaan perencanaan mengakibatkan perusahaan kecil tidak dapat memusatkan segala tenaga dan daya untuk mencapai sasaran dan urutan prioritas. Ketidakadaan perencanaan mengakibatkan segala tindakan dan kebijakan hanya bersifat provisoris atau berdasarkan perasaan ataupun pengalaman dan tanpa pedoman yang jelas dan konkret.

2) Tidak Berorientasi Kemasa Depan, Melainkan Kepada Masa Kemarin atau Hari Ini

Bukan rahasia lagi jika perusahaan kecil dan menengah memulai usahanya karena melihat orang lain maju, atau sekedar mencoba atau asal jalan karena tidak ada kegiatan lain. Umumnya, orientasi mereka ialah barang atau usaha yang laku kemaren atau saat ini.

3) Tanpa Pembukuan yang Teratur dan Tanpa Neraca Laba-Rugi

Akibat tanpa perencanaan tertulis dan kurang pendidikan umumnya perusahaan kecil tidak memiliki dan tidak mempraktekkan pembukuan yang teratur, paling hanya mempunyai catatan tercecer berapa yang laku hari ini. Dan tidak jelas uang pribadi atau uang perusahaan. Cara pemakaian uang simpang siur.

¹⁷Bastian Bustami, *Mari Membangun Usaha Mandiri*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.

Tidak jelas berapa sebenarnya gaji pemilik setiap bulan. Kebutuhan akan pembukuan dianggap hanya membuang-buang waktu dan biaya.

Di negara industri, perusahaan kecil wajib mengadakan pembukuan kecil yang rapi terutama untuk kepentingan pembebanan pajak penjualan, pajak nilai tambahan, dan pajak pendapatan. Umumnya, perusahaan kecil juga tidak memiliki neraca laba-rugi baik tidak atau belum memerlukannya. Akhirnya dapat diduga bahwa mereka pada saat akhir tahun atau tahun buku tidak dapat mengetahui berapa sebenarnya laba atau rugi yang mereka dapat atau alami tahun ini.

4) Tidak Mempunyai atau Tidak Mengadakan Analisis Pasar yang (*up to date*) atau Tepat Waktu dan Mutakhir.

Perusahaan kecil hanya sekedar mengira-ngira dan bertumpu pada pengalaman hari kemarin. Mereka tidak tahu berapa besar potensi pasar, berapa pesaing, apa kekuatan dan kelemahan pesaing, bagaimana kecenderungan selera pembeli, bagaimana perkembangan teknologi atau perkembangan produk.

5) Besarnya piutang tak tertagih

Salah satu kelemahan manajemen pemasaran pada usaha kecil adalah mudah menjual secara kredit. Akibat dari kebijakan menjual secara kredit tersebut adalah banyaknya piutang tak tertagih. Sudah menjadi karakter orang banyak membeli produk secara kredit. Dengan semakin banyak keinginan konsumen membeli secara kredit yang disetujui perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan jumlah piutang yang tidak tertagih.¹⁸

2. Pengertian Akuntansi

a. Definisi Akuntansi

Ada beberapa definisi akuntansi yang dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu akuntansi sebagai seni (*art*), akuntansi sebagai ilmu (*science*), dan akuntansi sebagai proses (*process*).

1) Akuntansi Sebagai Seni

¹⁸B.N. Marbun. *Kekuatan dan Kelemahan Perusahaan Kecil*, (Jakarta: Gramedia, 1986) h. 35-39.

Seni adalah usaha manusia yang paling kreatif. Seni adalah kecakapan (*know-how*) untuk mencapai hasil yang nyata yang diinginkan. Berikut ini definisi akuntansi seni adalah (*Accounting is the art of recording classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and event which are, in apartbat least, of financial character, and interpreting the result there of*) akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan dengan suatu cara yang berarti dan dalam nilai uang, kejadian dan transaksi yang paling sedikit atau sebagian, bersifat keuangan dan atas penafsiran hasilnya. Akuntansi dikatakan sebagai seni, karena akuntansi adalah kemampuan, keyakinan, firasat, kreatif, ditambah dengan keahlian atau kepandaian yang diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan dan bersifat individual.

2) Akuntansi Sebagai Ilmu

Suatu ilmu yang mengajarkan kita untuk mengetahui sesuatu, sedangkan suatu seni mengajarkan kita apa yang perlu kita lakukan. Misalnya, metode penyusutan adalah ilmu akuntansi, sedangkan kebebasan memilih metode mana yang cocok dipakai adalah seni akuntansi. Seni dan ilmu tidak saling bertentangan melainkan saling melengkapi.

Definisi sebagai ilmu (*sctense*) Akuntansi adalah suatu disiplin ilmu yang memperoleh mekanisme, sistem dan prosedur dalam mencatat, mengelompokkan, mengikhtisarkan dan melakukan interpretasi atas transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu organisasi dan dinyatakan dalam suatu nilai uang.

3) Akuntansi Sebagai Proses

Definisi akuntansi sebagai proses adalah (*accounting is the process of indentifying, measuring, and communicating economic information to permitinformend judgements and decisions by users of the information*). Artinya, akuntansi adalah proses pengidentifikasian transaksi, yang kemudian melakukan pengelompokan, pengikhtisaran, yang menghasilkan laporan keuangan dan penyampaian informasi untuk memungkinkan memperoleh penilaian dan keputusan yang tepat bagi pemakai informasi itu.

Akuntansi adalah pengetahuan badan dan fungsinya terkait dengan sistematika pencatatan, pengklasifikasian, pengelolaan, peringkasan penganalisisan, penafsiran, dan tuntutan informasi yang andal dan signifikan meliputi, transaksi, dan kejadian-kejadian yang terkait, setidaknya untuk sebahagian dari karakter keuangan, yang diperoleh oleh manajemen dan operasionalisasi suatu entitas dan untuk pelaporan yang harus disampaikan guna memenuhi *fiduciary* dan tanggung jawab lainnya.¹⁹

Akuntansi menurut Islam adalah (Muhasabah) didefinisikan suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai syari'ah dan jumlah-jumlahnya, disalam catatan representative, serta berkaitan dengan pengukuran hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi, tindakan dan keputusan terebut membantu pengambilan keputusan yang tepat.

Akuntansi sebenarnya merupakan domain muamalah Kajian Islam. Artinya diserahkan pada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Namun, karena pentingnya permasalahan ini maka ALLAH SWT berfirman dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

¹⁹Arfan Ikhsan dkk, *Pengantar Akuntansi*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 17.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan, (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkan. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat tidak (menimbulkan) keraguan. (tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa diantara kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit dan menyulitkan, jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 282).²⁰

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan tolonglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S Al-Isra' : 35)

²⁰Muammar Khaddafi dkk, *Akuntansi Syari'ah Meletakkan Nilai-nilai Syari'ah Islam dalam Ilmu Akuntansi*, (Medan: Penerbit Madenatera, 2016), h.11.

Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi adalah bahasa bisnis (*business language*). Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa mendatang. Berdasarkan informasi tersebut berbagai pihak dapat mengambil keputusan terkait dengan entitas.²¹

Sistem Akuntansi, sebagai salah satu bidang ilmu akuntansi, dapat digunakan sebagai alat yang sangat bermanfaat bagi keputusan untuk pendirian suatu UMKM maupun untuk menyusun pola manual sistem informasi sebagai kegiatan operasional sehari-hari dari seluruh karyawan dan manajemen UMKM. Sehingga para pengusaha kecil dan menengah mampu meningkatkan bisnis mereka, mengingat persaingan bisnis global semakin ketat, persaingan ini akan berdampak pada kinerja suatu UMKM.²²

b. Laporan Keuangan

1) Pengertian laporan keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang bersifat sejarah, yang tidak lain merupakan laporan atas kejadian-kejadian yang telah lewat, maka terdapat keterbatasan dalam kegunaannya laporan keuangan adalah produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability*.

Dan juga dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuannya.²³ Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi serta Laporan Perubahan Modal, dimana Neraca

²¹Dwi Martani dkk, *akuntansi keuangan menengah*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2012), h. 4.

²²FE Ubaya dan Forda Jawa Timur, *Kewirausahaan UKM*, h. 200.

²³Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 7.

menunjukkan atau menggambarkan jumlah aset, hutang, dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan perhitungan (laporan laba rugi) memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan Perubahan Modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Tetapi dalam prakteknya sering diikuti sertakan kelompok lain yang sifatnya membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, misalnya laporan perubahan modal kerja, laporan sumber dan penggunaan kas atau laporan arus kas, laporan sebab-sebab perubahan laba kotor, laporan biaya produksi serta daftar-daftar lainnya.²⁴

Laporan keuangan sangat perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Pada awalnya, laporan keuangan bagi perusahaan hanyalah sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut, dimana dengan hasil analisis tersebut pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil suatu keputusan.²⁵ Laporan keuangan minimum terdiri dari:

- 1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- 2) Laporan laba rugi selama periode;
- 3) Catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.

Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, entitas menunjukkan informasi berikut dengan jelas dan diulangi bilamana perlu untuk pemahaman informasi yang disajikan:

- 1) Nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan
- 2) Tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan keuangan:
- 3) Rupiah sebagai mata uang penyajian: dan
- 4) Pembulatan angka yang digunakan dalam laporan keuangan.

²⁴S. Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, (yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2014), h. 5.

²⁵ Arfan Ikhsan, *Analisi Laporan Keuangan*, (Medan: Madenatera, 2016), h. 3.

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun insvestor.

Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas-ekuitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1) Aset

Manfaat ekonomi masa depan suatu aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan konstibusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap arus kas entitas. Arus kas tersebut dapat timbul dari penggunaan maupun pelepasan aset. Beberapa aset memiliki wujud, sementara beberapa aset tidak memiliki wujud (tak berwujud). Namun demikian, wujud aset tidak esensial untuk menentukan keberadaan aset.

2) Liabilitas

Karakteristik esensial dari liabilitas adalah bahwa entitas memiliki kewajiban saat ini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif. Kewajiban hukum dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Kewajiaban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas ketika:

- a) Oleh praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggungjawab tertentu: dan

- b) Akibatnya, timbul ekspektasi kuat dan sah dari pihak lainnya bahwa entitas akan melaksanakan tanggungjawab tersebut.

Penyelesaian kewajiban saat ini biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset selain kas, pemberian jasa, dan atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain. Kewajiban juga dapat diselesaikan dengan cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya.

3) Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas adalah klaim atas hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas merupakan klaim terhadap entitas, yang tidak memenuhi definisi liabilitas.

Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dengan Laporan Laba Rugi. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan yang lain. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1) Penghasilan

Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*).

- a) Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, yang dikenal dengan berbagai sebutan, misalnya: penjualan, imbalan, bunga, deviden, royalti, dan sewa.
- b) Keuntungan mencerminkan kas lain yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak termasuk kedalam kategori pendapatan, misalnya: keuntungan dari pelepasan aset.

2) Beban

Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal. Beban mencakup beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan kerugian.

- a) Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah dan penyusutan.
- b) Kerugian mencerminkan kas lain yang memenuhi definisi beban namun tidak termasuk dalam kategori beban yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, misalnya: kerugian dari pelepasan aset.²⁶

2) Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur (aset, liabilitas, ekuitas, dan informasi kinerja keuangan) dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Manfaat Ekonomi Masa Depan

kriteria pengakuan mengacu pada saat dapat dipastikan bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat pada aliran manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang terkait dengan kondisi yang tersedia pada akhir periode pelaporan saat penyusunan laporan keuangan. Penilaian ini dibuat secara individu untuk pos-pos yang signifikan secara individual dan secara kelompok dari suatu populasi besar untuk pos-pos yang tidak signifikan secara individual.

b) Keandalan Pengukuran

²⁶Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*, (Jakarta: Grha Akuntan, 2018), h. 3-4.

Kriteria kedua untuk pengakuan suatu pos adalah adanya biaya yang dapat diukur dengan andal. Dalam banyak kasus, biaya suatu pos dapat diukur dengan andal. Dalam kasus lainnya, biaya tersebut harus diestimasi. Jika pengukuran yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pos tersebut tidak diakui dan tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi.

3) Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

Materialitas, relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Kelalaian untuk mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan keadaan terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu.

4) Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, entitas, penghasilan, dan beban. Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu Dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas.

Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan:

- a) *Relevan*: informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan.
- b) *Representasi tepat*: informasi dalam laporan keuangan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan dan bebas dari kesalahan material dan bias.
- c) *Keterbandingan*: informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecurangan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengavaluasi posisi dan kinerja keuangan.
- d) *Keterpahaman*: informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

Entitas yang laporan keuangan telah patuh terhadap SAK EMKM membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK EMKM, kecuali laporan keuangan telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK EMKM.²⁷

5) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah

SAK EMKM disusun untuk mendorong dan memfasilitasi kebutuhan pelaporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak riset yang menemukan bahwa sebagian UMKM masih belum dapat menerapkan

²⁷Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*, (Jakarta: Grha Akuntan, 2018), h. 6-7.

standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dengan tepat, karena SAK ETAP dianggap masih terlalu kompleks dan tidak sesuai dengan kebutuhan laporan keuangan UMKM.

Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro mensyaratkan agar lembaga keuangan mikro melakukan dan memelihara pencatatan dan atau pembukuan keuangan yang sesuai dengan SAK yang berlaku. Untuk memenuhi amanah ini, DSAK IAI menyusun SAK EMKM yang:

- a. Konsisten dengan pilar standar akuntansi keuangan yang ada;
- b. Mencerminkan perkembangan terkini mengenai operasi bisnis dan transaksi yang dilakukan oleh entitas secara umum.
- c. Menyeimbangkan prinsip akuntansi yang sesuai dengan ukuran, kompleksitas, kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan; dan
- d. Berdasarkan prinsip epektifitas biaya

Dalam menyusun SAK EMKM, DSAK IAI mempertimbangkan standar akuntansi keuangan serupa yang diterbitkan oleh badan penyusun standar akuntansi keuangan di negara lain, dan/atau pedoman akuntansi serupa di negara-negara lain semangkin menegaskan adanya kebutuhan akan suatu standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan UMKM. Entitas yang masuk dalam dalam ruang lingkup SAK EMKM adalah entitas yang memenuhi seluruh kriteria maupun karakteristik sebagai berikut:

- a. Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.
- b. Bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar (bukan merupakan entitas anak dan entitas asosiasi) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 UU No 20 Tahun 2008.

- c. Rentang kauntitatif sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 UU No 20 Tahun 2008
- d. Tidak memiliki dan/atau menguasai UMKM mitra usahanya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 35 UU No Tahun 2008.

SAK EMKM mensyaratkan entitas untuk memenuhi seluruh kriteria, kecuali untuk entitas yang baru pertama kali didirikan, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut, dengan pertimbangan bahwa pemenuhan kriteria tidak bersifat temporer dan bahwa entitas tersebut memang memenuhi kriteria yang sesuai dengan intensi awal DSAK IAI dalam menyusun SAK EMKM. Artinya, entitas dapat menerapkan SAK EMKM dalam konteks laporan keuangan tahun pertamanya jika seluruh kriteria terpenuhi pada tahun pertama tersebut dan jika entitas memang memilih untuk menerapkan SAK EMKM. Pada tahun kedua, entitas dapat menerapkan SAK EMKM jika seluruh kriteria terpenuhi.

Namun, jika entitas tidak lagi memenuhi seluruh kriteria pada tahun kedua, maka penilaian apakah entitas masih dapat menerapkan SAK EMKM hanya ditentukan jika pemenuhan kriteria terjadi dalam 2 tahun berturut-turut. DSAK IAI memahami kebutuhan pengguna laporan keuangan, misalnya kreditor, atas konsistensi penggunaan kerangka penyusunan laporan keuangan antar waktu, sehingga analisis atas posisi dan kinerja keuangan didasarkan atas informasi keuangan yang disusun dengan basis yang konsisten.

Selama proses pembahasan dalam kelompok kerja, DSAK IAI juga memperoleh informasi bahwa dalam penyaluran kredit, kreditor pada umumnya mensyaratkan entitas telah menjalankan usahanya paling sedikit 2 tahun dilokasi dengan bidang usaha yang sama. Oleh karena itu, persyaratan pemenuhan kriteria selama 2 tahun berturut-turut menjadi relevan.

Jika dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK EMKM merupakan standar yang paling sederhana, sehingga entitas yang memenuhi persyaratan menggunakan SAK EMKM ini tetap perlu mempertimbangkan apakah ketentuan yang diatur oleh SAK EMKM ini telah sesuai dan memenuhi kebutuhan

pelaporan keuangan entitas tersebut. Oleh karena itu, entitas perlu mempertimbangkan kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan, apakah berdasarkan SAK EMKM atau SAK lainnya, dengan memperhatikan kemudahan yang ditawarkan dalam SAK EMKM, dan kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan entitas tersebut.

Selain kriteria yang wajib dipenuhi, entitas yang masuk dalam ruang lingkup SAK EMKM dapat:

- a. Menerima hibah dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat dari pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 21 UU No 20 Tahun 2008;
- b. Menyelenggarakan usaha dengan modal patungan (joint venture) dengan pihak asing sebagaimana dijelaskan dalam pasal 32 UU No 20 Tahun 2008; dan
- c. Memiliki saham milik Usaha Besar yang terdaftar di Bursa Efek sebagaimana dijelaskan dalam pasal 33 UU No 20 Tahun 2008.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual dan kelangsungan usaha. Terdapat tanggapan dari kelompok kerja dan publik yang mengusulkan agar SAK EMKM menggunakan asumsi dasar kas, dengan mempertimbangkan keterbatasan dan sumber daya UMKM dalam menyusun laporan keuangan. DSAK IAI memahami keterbatasan kapabilitas dan sumber daya UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Namun demikian, untuk entitas dengan jenis usaha dan yang tidak kompleks dan dengan mayoritas transaksi yang dilakukan secara kas, maka perbedaan antara basis kas dan basis akrual mungkin saja menjadi tidak material.

Entitas dapat melakukan pencatatan transaksi dengan basis kas, dan melakukan penyesuaian basis akrual pada akhir periode pelaporan. Dengan harapan bahwa dalam jangka panjang UMKM akan berkembang menjadi lebih besar sehingga terdapat kebutuhan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK lainnya, maka DSAK IAI memandang perlu untuk

memperkenalkan konsep akrual dalam penyusunan laporan keuangan UMKM. Selain dasar akrual dan kelangsungan usaha, SAK EMKM ini secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasar. Untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan antara suatu usaha/entitas dengan usaha/entitas lainnya.

SAK EMKM hanya mengakomodasi metode pengukuran berdasarkan biaya historisnya saja; baik untuk pengukuran pada saat pengakuan awal maupun pengukuran setelah pengakuan awal. DSAK IAI menilai bahwa metode pengukuran biaya historis lebih mudah diterapkan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan UMKM dalam menganalisis informasi keuangan. Dengan mempertimbangkan jenis usaha dan transaksi yang relatif tidak kompleks, penggunaan metode pengukuran berdasarkan nilai wajar serta metode penurunan nilai dianggap kurang relevan.

Dasar pengukuran biaya historis tidak dikombinasi dengan dasar pengukuran lain agar dapat menghasilkan struktur standart akuntansi yang optimal untuk UMKM sehingga dapat diterapkan pada biaya yang lebih rendah. Oleh karena itu, salah satu kemudahan yang ditawarkan dalam SAK EMKM ini adalah pengukuran yang hanya berdasarkan pada biaya historis saja.²⁸

3) Karakteristik Kualitatif Informasi Dalam Laporan Keuangan

a) Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang

²⁸Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*, (Jakarta: Grha Akuntan, 2018), h. 41-45.

relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

b) Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masakini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

c) Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK EMKM agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas.

d) Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

e) Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-

hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengijinkan bias.²⁹

f) Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

g) Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut.

h) Tepat Waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin

²⁹ *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. 2009, h. 3.

perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.³⁰

i) Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.³¹

7). **Unsur-Unsur Laporan Keuangan SAK EMKM**

a. Aset

Menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu akhir periode pelaporan. Menyajikan aset kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu akhir periode pelaporan. SAK ETAP mensyaratkan pos-pos minimal yang perlu pada neraca.

Tabel 2.1
Pos-pos Neraca

ENTITAS LAPOPAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2018			
ASSET	Catatan	2018	2017
Kas dan setara kas			
Kas	3	Rp.xxx	Rp.xxx
Giro	4	Rp.xxx	Rp.xxx
Deposito	5	Rp.xxx	Rp.xxx

³⁰Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. 2009, h. 4.

³¹Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. 2009, h. 5.

<i>Jumlah kas dan setara kas</i>		Rp.xxx	Rp.xxx
Piutang usaha	6	Rp.xxx	Rp.xxx
Persediaan		Rp.xxx	Rp.xxx
Beban dibayar di muka	7	Rp.xxx	Rp.xxx
Aset tetap		Rp.xxx	Rp.xxx
Akumulasi penyusutan		(Rp.xxx)	(Rp.xxx)
<i>Jumlah Asset</i>		Rp.xxx	Rp.xxx
<i>Liabilitas</i>			
Utang usaha		Rp.xxx	Rp.xxx
Utang bank	8	Rp.xxx	Rp.xxx
<i>Jumlah liabilitas</i>		Rp.xxx	Rp.xxx
<i>Ekuitas</i>			
Modal		Rp.xxx	Rp.xxx
Saldo Laba	9	Rp.xxx	Rp.xxx
<i>Jumlah Ekuitas</i>		Rp.xxx	Rp.xxx
<i>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</i>		Rp.xxx	Rp.xxx

Sumber: SAK EMKM, 2018

b. Laporan Laba Rugi

Menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) mensyaratkan pos-pos minimal yang perlu pada neraca.

Tabel 2.2

Pos pada Laba Rugi

ENTITAS LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018			
Pendapatan	Catatan	2018	2017
Pendapatan usaha	10	Rp.xxx	Rp.xxx
Pendapatan lain-lain		Rp.xxx	Rp.xxx
<i>Jumlah pendapatan</i>		Rp.xxx	Rp.xxx
<i>BEBAN</i>			
Beban usaha	11	Rp.xxx	Rp.xxx
Beban lain-lain		Rp.xxx	Rp.xxx
<i>Jumlah Beban</i>		Rp.xxx	Rp.xxx
<i>Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan</i>		Rp.xxx	Rp.xxx
Beban pajak penghasilan	12	Rp.xxx	Rp.xxx
<i>Laba (rugi) setelah pajak penghasilan</i>		Rp.xxx	Rp.xxx

Sumber: SAK EMKM, 2018

c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menyajikan catatan atas laporan keuangan entitas untuk suatu periode.
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

mensyaratkan pos-pos minimal yang perlu.³²

Tabel 2.3

Pos pada catatan atas laporan keuangan

Entitas Catatan atas Laporan Keuangan 31 Desember 2018
<p>1. UMUM</p> <p>Entitas didirikan di jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris dijakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di jalan xxx, jakarta utara.</p> <p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING</p> <p>a. Pernyataan Kepatuhan</p> <p>Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>b. Dasar Penyusunan</p> <p>Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.</p> <p>c. Piutang Usaha</p> <p>Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.</p> <p>d. Persediaan</p> <p>Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja</p>

³²Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*, (Jakarta: Grha Akuntan, 2018), h. 50-54.

langsung dan *overhead*.

e. Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. Kas

	2018	2017
Kas kecil Jakarta-Rupiah	Rp.xxx	Rp.xxx

4. Giro

PT Bank xx-Rupiah	Rp.xxx	Rp.xxx
-------------------	--------	--------

5. Deposito

PT Bank xxx-Rupiah	Rp.xxx	Rp.xxx
Suku Bunga-Rupiah	Rp.xxx	Rp.xxx

6. Piutang Usaha

Toko A	Rp.xxx	Rp.xxx
Toko B	Rp.xxx	Rp.xxx

Jumlah

7. Beban Dibayar dimuka

Sewa	Rp.xxx	Rp.xxx
Asuransi	Rp.xxx	Rp.xxx

Lisensi dan perizinan	Rp.xxx	Rp.xxx
Jumlah		
8. Utang Bank		
<p>Pada tanggal 4 maret 2018, entitas memperoleh pinjaman kredit modal kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit RP.xxx, suku bunga efektif 11% pertahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 2018. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.</p>		
9. Saldo Laba		
<p>Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.</p>		
10. Pendapatan Penjualan		
Penjualan	Rp.xxx	Rp.xxx
Return penjualan	Rp.xxx	Rp.xxx
Jumlah		
11. Beban Lain-Lain		
Bunga Pinjaman	Rp.xxx	Rp.xxx
Lain-lain	Rp.xxx	Rp.xxx
Jumlah		
12. Beban Pajak Penghasilan		
Pajak penghasilan	Rp.xxx	Rp.xxx

Sumber: SAK EMKM, 2018

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu yang peneliti ambil sebagai penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Penelitian yang Relevan

NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
------	-------	------------------	-----------

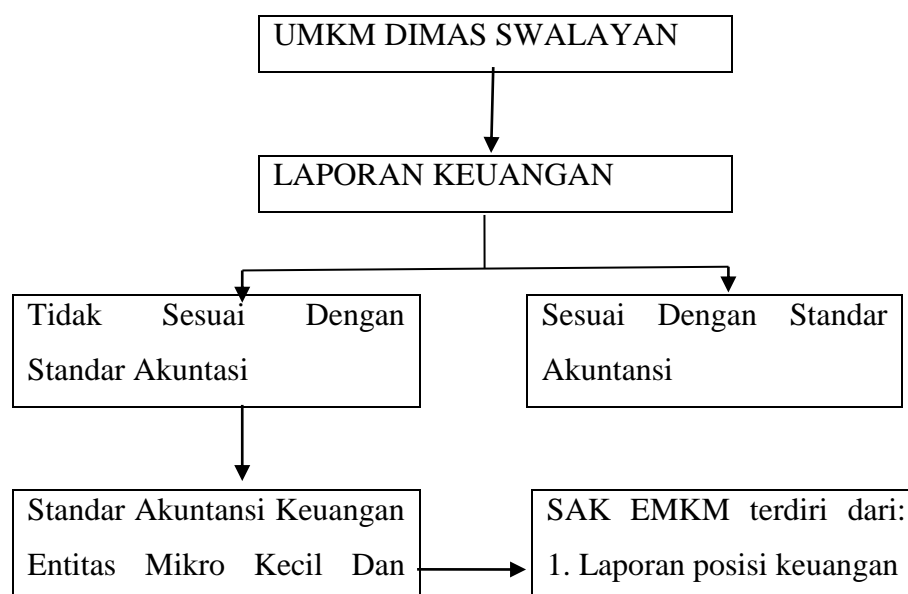
Abdu Muchid (2015)	Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKEMKM) pada UD Mebel Novel' L Banyuwangi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, laporan keuangan yang digunakan hanya mencatat barang masuk dan keluar oleh bagian laporan keuangan setiap harinya. Laporan keuangan yang dibuat oleh peneliti yang sesuai dengan SAK ETAP yaitu, laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan CALK	Perbedaan terletak pada standar akuntansi keuangan yang diterapkan oleh UMKM tersebut. Serta tempat penelitiannya juga berbeda.
Nurlaila (2018)	Penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM) pada Sukma Cipta Ceramic Dinoyo Malang	Hasil dari penelitian ini adalah penyusunan laporan belum sesuai dengan SAK EMKM	Tahun dilakukannya penulisan dan tempat penelitiannya.

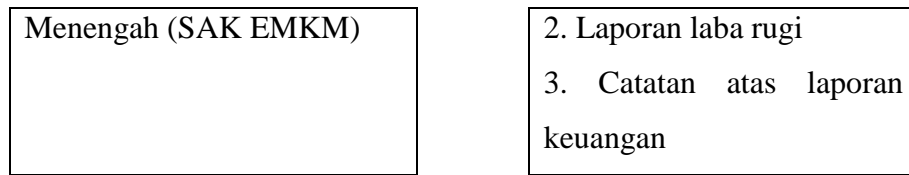
Edi Susanto (2011)	Analisis Penerapan SAK ETAP di UMKM Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa laporan yang digunakan tidak sesuai dengan standar, entitas belum melakukan penerapan akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku yaitu SAK ETAP karena keterbatasan waktu, dan keterbatasan sumber daya manusia.	Lokasi penelitian atau objek penelitian menjadi permbeda penelitian.
Ade Astalia Pratiwi, Julie J Sondakh, Lintje Kalangi (2014)	Analisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Penyajian Laporan Keuangan PT. Nichindo Manado	Adapun hasil penelitian berdasarkan Neraca, dan Laporan Laba Rugi, tahun 2011 dan 2012, belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CALK, serta terjadinya inkonsisten dalam penyajian CALK	Lokasi penelitian atau objek penelitian menjadi permbeda penelitian. Serta standar yang diterapkan dan berlaku.
Dewi Ratna Lubis (2015)	Penerapan Akuntansi untuk usaha kecil dan menengah dan kesesuaiannya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pemilik UKM tentang SAK ETAP masih rendah,	Lokasi penelitian atau objek penelitian menjadi permbeda

	dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) studi kasus UD. Semoga Sukses	karena tidak adanya tenaga akuntansi yang professional.	penelitian. Serta standar yang diterapkan dan berlaku.
--	---	---	--

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digambarkan dalam penyusunan penelitian ini, agar penelitian terperinci dan terarah. Guna memudahkan dan memahami inti pemikiran penelitian, maka perlu kiranya dibuat kerangka pemikiran dari masalah yang diangkat, yang digambarkan sebagai berikut:





Gambar 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif merupakan suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.³³

³³Arfan Ikhsan, *et. al.*, *Metodologi Penelitian bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 35.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola data, kemudian menyajikan data observasi, agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dengan situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif.

Desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.³⁴

Yang paling utama adalah mendapatkan gambaran secara mendalam tentang pemahaman dan penyajian SAK EMKM yang diterapkan oleh para pelaku UMKM dalam penyajian laporan keuangan usahanya. Dengan demikian bisa dijelaskan, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan guna menginterpretasikan atau memaparkan suatu kasus yang dilakukan oleh objek penelitian dengan menghimpun fakta dengan cermat berdasarkan teori ilmiah yang ada, sehingga pembaca memperoleh gambaran yang konkret terhadap teori dan praktik yang sudah ada.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Usaha Dagang Dimas Swalayan yang terletak di Dusun IV, Desa Marjanji, Kecamatan Sipis-pis, Kabupaten Serdang Bedagai. Waktu penelitian dari tanggal 15 Agustus 2019 sampai 15 September 2019.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah sumber data penelitian. Subjek penelitian adalah individu yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk

menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas sesuatu perlakuan yang diberikan kepadanya.

Istilah responden atau subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan, yaitu orang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti terkait dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Adapun informan yang menjadi subjek penelitian ini, yaitu pelaku Usaha Dagang Dimas Swalayan Dusun IV, Desa Marjanji, Kecamatan Sipis-pis, Kabupaten Serdang Bedagai.

D. Sumber Data

Sumber data dapat dikatakan sebagai awal dari mana datangnya data dan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan bagi setiap penentuan metode pengumpulan data. Bila dilihat dari sumbernya maka data dalam penelitian bisnis dapat dikumpulkan dengan menggunakan dua sumber data, yaitu: data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).³⁵ Adapun kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan penulisan penelitian ini, antara lain dengan mencari dan mengumpulkan data dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara.
2. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini, digunakan sebagai pelengkap dari data primer diperoleh dari *library search*, terutama dari *text books* pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel, yang telah tersusun dalam arsip baik yang telah dipublikasiakan dan yang tidak dipublikasiakan.

E. Teknis dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data merupakan langkah yang paling umum dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data

³⁵Arfan Ikhsan, et, al., *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 112.

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Pengumpulan data primer

Dilakukan dengan mengadakan survei langsung kelokasi yang menjadi objek penelitian, dimana metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan, perhatian, atau pengawasan. Metode pengumpulan data dengan observasi artinya mengumpulkan data atau menjangkau data dengan melakukan pengamatan terhadap subjek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis.³⁷ Observasi yang berarti mengamati bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau yang diperoleh sebelumnya.³⁸ Metode ini digunakan oleh peneliti untuk menggali data dari dekat yang bersifat nyata, sehingga peneliti dapat mengamati dan mencatat langsung data lapangan yang berkaitan dengan fenomena yang ada di lokasi penelitian.

Alat yang digunakan dalam proses observasi ini adalah *checklist*. *Checklist* merupakan suatu daftar yang mencakup faktor-faktor yang ingin diselidiki. *Checklist* merupakan daftar yang berisi unsur-unsur yang mungkin terdapat dalam situasi atau tingkah laku atau kegiatan individu yang diamati.³⁹

Dengan menggunakan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa checklist adalah salah satu alat observasi yang ditujukan untuk memperoleh data berbentuk daftar berisi faktor-faktor subjek yang ingin diamati oleh observer, dimana observer dalam pelaksanaan observasi di lapangan cukup memberi tanda *checklist* (centang) pada list faktor-faktor sesuai perilaku

³⁶Sugiono, *Methodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 401.

³⁷Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.136.

³⁸Tim Dosen, *Handout Observasi*, (Malang: UIN Malang, 2009), h. 1.

³⁹*Ibid*, h. 5.

subjek yang muncul. Dalam penelitian ini, observasi dan pengisian *cheaklist* dilakukan oleh pemilik Usaha Dagang Dimas Swalayan dengan tujuan sebagai data pendukung hasil penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka pada pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman (*guide*) wawancara. wawancara ini sudah termasuk kedalam kategori *in-dept-interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁴⁰

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu laporan yang tertulis dari peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran peristiwa dan ditulis secara sengaja untuk menyimpan atau meneruskan peristiwa.

F. Teknik Analisis Data

Analisi data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian.⁴¹ Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif, adalah penelitian berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen

⁴⁰Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 413.

⁴¹Arfan Ikhsan, et, at., *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h.17

lainnya.⁴²

Jadi penelitian ini membandingkan teori dengan kenyataan atau praktek tentang penerapan akuntansi pada Usaha Dagang Dimas Swalayan dan melihat kesesuaiannya dengan SAK EMKM dengan transkripsi wawancara, dengan memberi pertanyaan yang berhubungan dengan pencatatan akuntansi SAK EMKM kepada responden. Dan melakukan perhitungan persentase dari hasil jawaban yang telah dikumpulkan.

Dalam pengelolaan data hasil pertanyaan-pertanyaan observasi dengan metode *checklist* yang penulis sajikan pilihan jawaban yang peneliti sajikan adalah Ya dan Tidak serta skor yang disajikan tiap alternatif jawaban Ya =1 dan Tidak =0 setelah mendapat jawaban dari responden lalu menghitung persentase jawaban yang diperoleh dari rEsponden dengan menggunakan rumus Dean J. Champion:

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{jumlah jawaban ya}}{\sum \text{Jumlah jawaba observasi}} \times 100\%$$

Untuk keperluan interpretasi hasil perhitungan persentase, Dean J Champion mengemukakan sebagai berikut:

1. 0%-25% berarti penerapan pencatatan akuntansi berdasarkan SAK EMKM tidak baik.
2. 25%-50% berarti penerapan pencatatan akuntansi berdasarkan SAK EMKM kurang baik.
3. 50%-75% berarti penerapan pencatatan akuntansi berdasarkan SAK EMKM cukup baik.
4. 50%-100% berarti penerapan pencatatan akuntansi berdasarkan SAK EMKM sangat baik.⁴³

⁴²Azhari Akmal,dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (medan: La-Tansa Press, 2011), h. 27.

⁴³Raja Kurnia, "*Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban (Studi Kasus pada PT. PLN Persero Tanjung Pinang)*", Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. 2014), h. 10.

Data wawancara terkait Penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) akan peneliti jabarkan secara sistematis dan rinci. Peneliti akan menjelaskan tentang penerapan SAK EMKM pada Umkm Dimas Swalayan. Kemudian peneliti akan menyajikan data secara naratif dari pengelola data dan informasi terkait pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Data yang telah disajikan akan digunakan sebagai penilaian terhadap pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Latar Belakang Perusahaan

Usaha Dagang Dimas Swalayan merupakan salah satu Usaha Dagang di Desa Marjanji dan usaha ini adalah usaha yang menawarkan berbagai macam kebutuhan rumah tangga, baik itu peralatan dapur, berbagai jenis pakaian baik berupa pakaian sekolah atau pakaian sehari-hari, menjual berbagai jenis makanan, dan juga menerima pembelian pesanan secara kredit. Usaha Dagang ini direspon baik oleh masyarakat, selain Usaha Dagang Dimas Swalayan memiliki banyak jenis produk yang ditawarkan kepada konsumen, lokasi usaha ini yang terletak di

depan jalan raya juga memudahkan akses pembeli untuk berbelanja ke Dimas Swalayan. Berdiri sejak tahun 2012 menjadi mata pencarian bagi keluarga Pak Dimas sendiri serta warga sekitar.

Karyawan yang dimiliki oleh perusahaan ini adalah 3 orang. 1 orang bertugas mengangkat barang-barang yang berat untuk diantarkan ke gudang persediaan atau mengangkat barang ke pembeli. Serta 2 karyawan lainnya bertugas untuk merapikan, membersihkan, serta mengawasi para pembeli. Dan yang bertugas sebagai kasir adalah pemilik usaha tersebut yaitu Pak Dimas. Tenaga kerja sebagian besar terdiri dari keluarga dan tetangga sekitar, usaha ini memberikan dampak yang cukup signifikan dalam membantu peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

Dimas Swalayan mempunyai ciri khas usahanya yaitu setiap barang dagangannya memiliki label harganya masing-masing, sehingga memudahkan pembeli karena tidak perlu bertanya tentang harga yang ditawarkan pada setiap produk yang dijual, ini menjadikan Usaha Dagang Dimas Swalayan menjadi satu-satunya usaha yang menerapkan label harga pada semua produk dagangannya.

2. Visi dan Misi Perusahaan

Dimas Swalayan mempunyai visi dan misi yang digunakan sebagai tujuan dalam menjalankan usahanya. Berikut ini adalah visi dan misi dari Usaha Dagang Dimas Swalayan :

Visi :

- a. Menjadi Usaha Dagang yang unggul dan baik dalam pelayanan pada konsumen Dimas Swalayan
- b. Mampu bersaing dipasar lokal

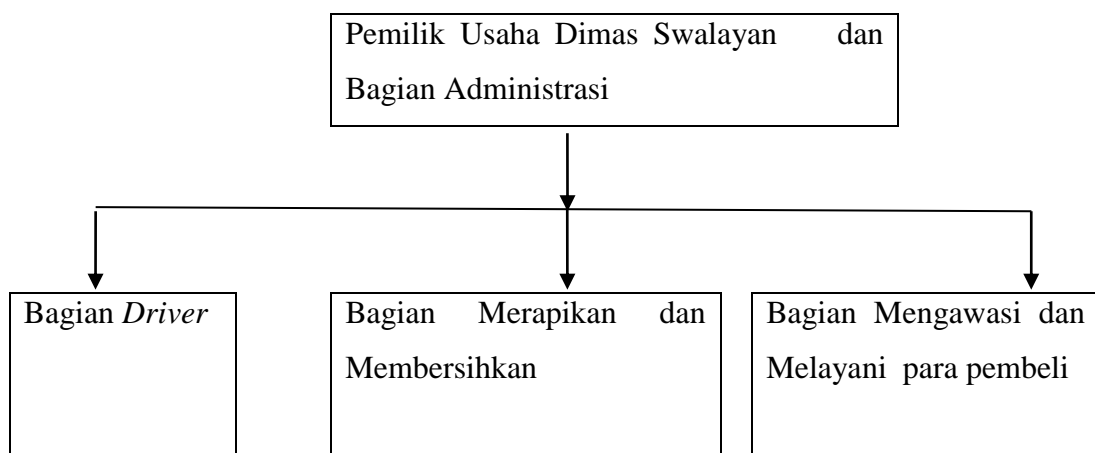
Misi

- a. Mampu mendistribusikan atau menjual barang dagangannya keseluruhan masyarakat
- b. Memberikan Harga Jual yang terjangkau masyarakat

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas, wewenang, dan tanggung jawab atas fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berbeda dalam organisasi tersebut. Dari struktur organisasi dapat dilihat pembagian dan pendistribusian tugas dari setiap orang dengan jelas. Gambaran struktur Usaha Dagang Dimas Swalayan sebagai berikut:

Struktur Usaha Dagang Dimas Swalayan



Gambar 4.1

Susuna pengurus Usaha Dagang Dimas Swalayan per bagian:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| a. Pemilik Usaha Dimas Swalayan | : Pak Dimas |
| b. Bagian administrasi/kasir | : Pak Dimas |
| c. Bagian Angkat Barang | : Bang Fajar |
| d. Bagian Merapikan dan Membersihkan | : Mbak Lia |
| e. Bagian Mengawasi dan Melayani | : Mbak Susan |

Berdasarkan struktur organisasi tersebut akan diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik Usaha Dagang Dimas Swalayan

Pemilik Usaha Dagang Dimas Swalayan ini selain menjadi pemilik UMKM juga merangkap sebagian keuangan yaitu bertugas juga sebagai kasir.

- a) Menetapkan kebijakan umum perusahaan
- b) Mengawasi kegiatan operasional
- c) Mencatat semua transaksi pemasukan dan pengeluaran

2. Bagian Driver

Bagian mengangkat barang ini bertugas mengangkat barang yang baru dibeli yang akan digunakan sebagai persediaan gudang penyimpanan, dan juga bertugas mengantarkan barang yang dibeli oleh pelanggan ke kendaraannya.

- a) Membantu pelanggan untuk mengangkat barang yang dibeli
- b) Bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan

3. Bagian Merapikan dan Membersihkan

- a) Bertanggung jawab atas kerapian dan kebersihan di Dimas Swalayan
- b) Memelihara peralatan dan persediaan di gudang penyimpanan
- c) Bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan

4. Bagian Mengawasi dan Melayani Pembeli

- a) Membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai produk
- b) Bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan

4. Maksud dan Tujuan Perusahaan

Melakukan Usaha dibidang penjualan barang dagang untuk mendapatkan

keuntungan guna meningkatkan nilai usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip Usaha Mikro Kecil.

B. Temuan Penelitian

1. Analisis Pencatatan dan Penyajian Laporan Keuangan dengan SAK EMKM

Penyajian laporan keuangan Usaha Dagang Dimas Swalayan berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha yang menyusun laporan keuangan dengan pertanyaan ya atau tidak sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pertanyaan Ya atau Tidak

No	Pertanyaan	Jawaban Observasi	
1.	Apakah laporan keuangan disajikan berdasarkan SAK EMKM yang diotorisasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah?		√
2.	Apakah Usaha Dagang Dimas Swalayan menyajikan laporan keuangan?	√	
3.	Apakah Usaha Dagang Dimas Swalayan menyajikan laporan keuangan secara lengkap?		√
4.	Apakah telah menyajikan pos-pos laporan keuangan secara konsisten?		√
5.	Apakah pengukuran Asset, Liabilitas, Penghasilan dan beban diukur berdasarkan biaya historis dan nilai wajar?		√

6.	Apakah Usaha Dagang Dimas Swalayan menyajikan Neraca?	√	
7.	Apakah telah menyajikan pos-pos neraca telah secara konsisten?		√
8.	Apakah Usaha Dagang Dimas Swalayan menyajikan Laporan Laba Rugi?	√	
9.	Apakah telah menyajikan pos-pos Laporan Laba Rugi telah secara konsisten?	√	
10.	Apakah Usaha Dagang Dimas Swalayan menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan?		√
11.	Apakah CALK menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan?		√
12.	Apakah CALK menyajikan informasi tambahan yang tidak digunakan laporan keuangan?		√

Berdasarkan tabel 4.1 kriteria kesesuaian penyajian laporan keuangan tersebut, maka dapat dihitung persentase penyajian laporan keuangan yang sesuai dan tidak sesuai dengan SAK EMKM.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \frac{\sum \text{jumlah jawaban ya}}{\sum \text{Jumlah jawaban observasi}} \times 100\% \\
 &= \frac{4}{11} \times 100 \% \\
 &= 36,36 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil persentase yang diperoleh dari perhitungan diatas, yaitu 36,36 %, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa penerapan SAK EMKM dalam penyajian laporan keuangan Usaha Dagang Dimas Swalayan Kurang Baik.

1. Deskripsi Laporan Keuangan Dimas Swalayan

Pemilik atau pemimpin usaha mengetahui bahwa laporan keuangan sangatlah penting untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan perusahaan. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh pemimpin/pemilik Usaha Dagang Dimas Swalayan saat wawancara pada hari Kamis 15 Agustus 2019 pukul 11.00 WIB:

“Laporan keuangan itu sangat penting nak, karena dengan mencatat laporan keuangan, perusahaan akan mengetahui transaksi apa saja yang dilakukan setiap hari, dan juga mengetahui pemasukan dan pengeluaran kas. Dimas Swalayan hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran berupa pembelian, gaji, pembayaran hutang, dan lain-lain “.

Pencatatan dan penyusunan laporan keuangan Usaha Dagang Dimas Swalayan masih sangat sederhana dan manual. Pencatatan dilakukan untuk mengetahui berapa besar pengeluaran seperti pembelian persediaan, pembayaran hutang, beban listrik dan beban gaji, dan untuk mengetahui pemasukan seperti penambahan kas dan modal dari pemilik usaha atau pendapatan dari penjualan. Meskipun dalam pencatatannya sudah bagus, tapi belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Pencatatan dibuat berdasarkan pemahaman pemilik usaha. Catatan Akuntansi Usaha Dagang Dimas Swalayan hanya menggunakan catatan sebagai berikut:

a. Catatan Kas

Usaha Dagang Dimas Swalayan melakukan pencatatan kas setiap hari untuk mengetahui transaksi pengeluaran dan pemasukan kas apa saja yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian catatan kas direkap perbulan dan pertahunnya untuk mengetahui semua transaksinya. Berikut catatan kasnya:

Tabel 4.1
Catatan Kas Dimas Swalayan
Per 31 Desember 2018

NO	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	Kas	282.098.000		282.098.000
2	Pendapatan	900.000		282.998.000
3	Persediaan	130.435.000		413.433.000
4	Pembelian Persediaan		136.145.000	277.288.000
5	Biaya Gaji Karyawan		43.200.000	234.088.000
6	Biaya Listrik		6.720.000	277.368.000
7	Biaya Air		2.220.000	225.148.000
8	Biaya Transport		5.448.000	219.700.000
9	Biaya Perawatan Kendaraan		1.600.000	218.100.000
10	Biaya Wifi		5.060.000	213.040.000
11	Biaya Lain-Lain		2.350.000	210.690.000
12	Hutang BPKB		10.800.000	199.890.000
13	Hutang Pak Wanto		5.000.000	194.890.000
13	Hutang Pak Husein		5.000.000	189.890.000
Total				189.890.000

Sumber: Dimas Swalayan, 2018

Definisi dari catatan kas juga disampaikan oleh pemilik Usaha Dagang Dimas Swalayan pada saat wawancara pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB:

“Catatan kas merupakan catatakan keluar masuknya uang perusahaan, mulai dari pendapatan atau diterimanya uang yang akan dicatat pada kolom pemasukan (debit) dan pengeluaran uang yang akan dicatat pada kolom pengeluaran (kredit)”.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman tentang pencatatan laporan keuangan dari pihak pemilik Usaha Dagang Dimas Swalayan masih sebatas pelaporan keuangan. Sehingga pemahaman tentang laporan keuangan adalah sebatas pencatatan keluar masuknya kas saja.

b. Catatan Hutang

Berikut ini catatan hutang Usaha Dagang Dimas Swalayan:

Tabel 4.2
Catatan Hutang Dimas Swalayan
Per 31 Desember 2018

No	Nama	Sisa Hutang (RP)
1	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	13.000.000
2	Pak rizal	5.000.000

Sumber: Dimas Swalayan, 2018

Usaha Dagang Dimas Swalayan mencatat hutang-hutang yang dimiliki yang dicatat secara manual dalam catatan hutang dan pembayaran hutang dilakukan setelah perusahaan mendapatkan keuntungan penjualan

c.Laporan Gaji Karyawan

Berikut laporan gaji per bulan pada Usaha Dagang Dimas Swalayan:

Tabel 4.3
Laporan Gaji Per Bulan Dimas Swalayan
Per 31 Desember 2018

No	Nama	Gaji Perbulan (Rp)
1	Bang Fajar	1.200.000
2	Mbak Lia	1.200.000
3	Mbak Susan	1.200.000

Total	3.600.000
-------	-----------

Sumber: Dimas Swalayan, 2018

Laporan beban gaji karyawan merupakan seluruh pencatatan dalam pembayaran gaji karyawan perbulan. Untuk pembayaran gaji dibayarkan setiap awal bulan setelah karyawan bekerja selama satu bulan.

d. Laporan Laba Rugi

Usaha Dagang Dimas Swalayan menghitung laporan laba/rugi, untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Untuk mengetahui laba atau rugi penghitungannya dilakukan dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diterimanya kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode 1 tahun. Berikut ini laporan laba/rugi oleh Usaha Dagang Dimas Swalayan:

Tabel 4.4

Laporan Laba Rugi Dimas Swalayan

Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

(Rp)

Pendapatan	282.998.000		
Total Pendapatan			282.998.000
Laba Kotor			282.998.000
Pembelian Persediaan		136.145.000	
Biaya Gaji Karyawan		43.200.000	
Biaya Listrik		6.720.000	
Biaya Air		2.220.000	
Biaya Transport		5.448.000	
Biaya Perawatan Kendaraan		1.600.000	
Biaya Wifi		5.060.000	
Biaya Lain-Lain		2.350.000	

Total Biaya		202.743.000	
Laba Bersih			80.255.000

Sumber: Dimas Swalayan, 2018

Pencatatan laporan laba rugi dari Usaha Dagang Dimas Swalayan belum memasukkan akun Harga Pokok Penjualan (HPP) didalam laporan laba/ruginya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan pemilik maupun karyawan administrasi dalam hal penyusunan laporan laba rugi perusahaan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pemilik Usaha Dimas Swalayan pada wawancara pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB:

“pencatatan laporan laba rugi di dapat dari semua pendapatan di kurangi oleh beban-beban yang di keluarkan, dan Bapak tidak memasukkan HPP didalam laporan laba/rugi karena keterbatasan pengetahuan tentang pencatatan laporan laba/rugi”.

b.Laporan Aset

Usaha Dagang Dimas Swalayan memiliki aset tetap berupa tanah, bangunan, dan kendaraan. Pencatatan dilakukan berdasarkan harga perolehan saat terjadinya transaksi. Berikut laporan aset Usaha Dagang Dimas Swalayan:

Tabel 4.5

Laporan Aset Dimas Swalayan

Per 31 Desember 2018

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Tanah	75.000.000
2	Bangunan	150.000.000
3	Kendaraan	80.000.000
Total		305.000.000

Sumber Dimas Swalayan, 2018

Usaha Dagang Dimas Swalayan dalam laporannya belum menghitung beban penyusutan dalam asetnya. Sehingga laporan nilai aset mulai dari awal

diterima hingga saat ini masih sama dan belum mengalami penyusutan. Seharusnya Usaha Dagang Dimas Swalayan juga menghitung beban penyusutan dari akun asetnya berdasarkan umur manfaat ekonomis.

C. Pembahasan

Usaha Dagang Dimas Swalayan hanya menyajikan laporan keuangan berupa catatan kas, catatan hutang, laporan gaji karyawan, laporan laba rugi, dan laporan aset, namun tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan dan penyajian pos-pos laporan keuangan Dimas Swalyan belum konsisten, serta tidak adanya pencatatan laporan posisi keuangan melainkan hanya mencatat kas masuk dan keluar saja. Sedangkan dalam SAK EMKM menyebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan (CALK)

Dampak bagi Usaha Dagang Dimas Swalayan tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan pos-pos keuangan secara konsisten dan tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan (CALK) adalah laporan keuangan tidak memberikan informasi yang sebenarnya, tidak mengetahui aset dan kewajiban yang dimiliki, tidak mengetahui kontribusi biaya yang dikeluarkan, tidak mengetahui kebocoran aset perusahaan, tidak memiliki proyeksi bisnis yang baik, dan ini yang paling buruk yaitu tidak bisa mendapat kredit usaha dari bank. Oleh karena itu penting menyajikan pencatatan laporan keuangan secara lengkap dan konsisten.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan Usaha Dagang Dimas Swalayan dengan SAK EMKM. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat di ringkas sebagai berikut:

1. Kondisi Pencatatan dan Penyajian Laporan Keuangan Usaha Dagang Dimas Swalayan belum sesuai dengan SAK EMKM karena tidak adanya pencatatan laporan posisi keuangan melainkan hanya pencatatan kas masuk dan keluar saja, CALK juga belum disajikan dalam pencatatan laporan keuangan. berdasarkan hasil persentase yang diperoleh sebesar 36,36 % . hal ini disebabkan Dimas Swalayan tidak memenuhi unsur kelengkapan laporan keuangan, yaitu tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan (CALK) dan pos-pos dalam laporan keuangan belum konsisten. Berdasarkan hasil wawancara, usaha dagang Dimas Swalayan belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) maupun pihak terkait lainnya.
2. Penerapan Laporan keuangan yang disusun oleh Dimas Swalayan terdiri atas catatan kas, laporan gaji karyawan, laporan laba rugi, laporan asset. Hal ini belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Di dalam SAK EMKM disebutkan bahwa laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang peneliti berikan sebagai berikut:

1. Bagi usaha dagang Dimas Swalayan sebaiknya menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM dan melengkapi pencatatan laporan keuangannya dengan menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan
2. Bagi karyawan ataupun Dimas Swalayan sebaiknya dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai SAK EMKM dan memperbaharui informasi terbaru mengenai penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar.
3. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebaiknya melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada UMKM tentang penerapan SAK EMKM dalam penyajian laporan keuangan. Sehingga dapat membantu UMKM yang belum mampu menerapkan SAK EMKM khususnya bagi pegawai yang mengerjakan laporan keuangan, sehingga akan timbul kesadaran pentingnya menyajikan laporan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan standar yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Feni Dewi dkk. *pengembangan usaha Mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui fasilitas pihak eksternal dan potensi internal*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, hlm. 1286-1295
- Adiningsih, Sri. *satu decade pasca-krisis Indonesia: Badai Pasti Berlalu?*, Yogyakarta: Kanisius, 2008
- Hartoko, Alfa. *40 Tool Dahsyat untuk Mengelola BisnisUMKM*. Jakarta: PT. Elex Media Kompatindo, 2010
- <https://forum.maxmanroe.com/melihat-perkembangan-umkm-di-indonesia>.
diunduh tanggal 18 Maret 2019
- Ikhsan, Arfan. *Analisi Laporan Keuangan*, Medan: Madenatera, 2016
- Ikhsan, Arfan.et, al., *Metodologi Penelitian bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Bandung: Citapustaka Media, 2014
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*, Jakarta: Grha Akuntan, 2018
- Justin, G. *Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil*, Jakarta: Salemba Empat, 2001
- Khaddafi, Muammar dkk. *Akuntansi Syari'ah MeletakkanNilai-Nilai Syari'ah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Penerbit Madenatera, 2016
- Karya Bersama Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya dan Forum Derah UMKM Jawa Timur, *kewirausahaan UMKM pemikiran dan pengalaman*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga,

2009

Kurnia Raja, “*Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban (Studi Kasus pada PT. PLN Persero Tanjung Pinang)*” skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. 2014

Munawir, S. *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2014

Marbun, B.N. *Kekuatan dan Kelemahan Perusahaan Kecil*, Jakarta: Gramedia, 1986

Nitisusastro, Mulyadi, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil* Bandung: ALFABETA, 2017

Nayla, P. Akifa . *komplet akuntansi untuk UKM dan waralaba*. Yogyakarta: Laksana, 2004

Partomo, Tiktik Sartika, Abd Rachman Seojoedono. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, Bojongkerta: Ghalia Indonesia, 2004

Pusptawati Lilis, Sri Dewi Anggraimi, *Sistem Infomasi Akuntansi*, Yogyakarta: graha ilmu, 2011

Rahmawati, Rini dkk. *pengantar bisnis*, Medan: Madenatera *Quallfiedpublisher*, 2018

Samryn. *Pengantar Akuntansi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015

Syafri, Sofyan. *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017

Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012

Ubaya, FE. dan Forda Jawa Timur, *Kewirausahaan UKM*, 2017

Undang-Undang nomer. 20 tahun 2008 pasal 1